

ANALISIS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JEMBER

by Yossi Wibisono

Submission date: 16-Jun-2023 01:37PM (UTC+0700)

Submission ID: 2117148564

File name: 849-1622-1-SM.pdf (233.91K)

Word count: 4562

Character count: 28720



2

ANALISIS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JEMBER

¹Amalia Malik, ²Yossi Wibisono, ³Ridwan Iskandar

¹Program Studi Teknologi Tanaman Perkebunan, Politeknik Lamandau
Jl. Jendral Sudirman Rt.12 C Nanga Bulik, Lamandau

² Program Studi Teknologi Pangan, Politeknik Negeri Jember
Jl Mastrip Kotak Pos 164, Jember Telpon:0331-333532, Faks.0331-333531
E-mail:amalia.mbipb.polije@gmail.com

ABSTRAK

2

Ketahanan pangan adalah kondisi pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan, kualitas dan kuantitas yang memadai, aman, merata, dan terjangkau. Jember adalah salah satu daerah yang memiliki nilai Desirable Dietary Pattern (DDP) di bawah Minimum Service Standards (MSS) di bidang ketahanan pangan pada tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui situasi konsumsi makanan di kabupaten Jember dan makanan lokal tradisional berperan dalam diversifikasi konsumsi makanan. Hasil penelitian ini adalah rekomendasi strategi pengembangan konsumsi makanan. Penelitian ini menggunakan metode survei berdasarkan data SUSENAS dengan 448 rumah tangga. Metode pengambilan sampel menggunakan stratified dan cluster sampling. Teknik penelitian menggunakan analisis tingkat ketersediaan makanan berdasarkan Food Balance Sheet (FBS) dan tingkat konsumsi makanan berdasarkan DDP. Analisis menunjukkan bahwa nilai konsumsi DDP Jember adalah 92,8 didominasi oleh beras. Ketersediaan pangan potensial berdasarkan NBM adalah biji-bijian, makanan hewani dan gula telah melampaui kebutuhan masyarakat. Di beberapa kelompok makanan yang mengalami defisit dan kerawanan pangan perlu peningkatan pasokan makanan di tingkat rumah tangga dengan mengembangkan komoditas pangan lokal sesuai dengan potensi sumber daya dan pola konsumsi masyarakat setempat.

Keyword: Ketahanan Pangan, Desirable Dietary Pattern (DDP), Ketersediaan Pangan

ABSTRACT

Food security is a condition of household fulfillment reflected in the availability of food, quality and quantity that is adequate, safe, equitable, and affordable. Jember is one of the areas that has the value of desirable dietary pattern (DDP) under Minimum Service Standards (MSS) in the field of food security in 2015. This research aims to know the situation of food consumption of Jember district and traditional local food role in diversification of food consumption. The result of this research is recommendation of food consumption development strategy. This research used survey method based on SUSENAS data with 448 households. Sampling method used stratified and cluster sampling. The research technique used analysis of food availability level based on food balance sheet (FBS) and food consumption level based on DDP. The analysis showed that consumption value of DDP Jember is 92,8 is dominated by rice. Potential food availability based on NBM is grains, food of animal and sugar has over stepped the needs of the community. In some food groups experiencing deficits and food in security needs to be an increase in food supply at the household level by developing local food commodities in accordance with potential resources and consumption patterns of local communities.

Keywords: Food Security, Desirable Dietary Pattern (DDP), Food Availability.



I. PENDAHULUAN

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan pangan ikut meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki ketahanan pangan yang kurang stabil. Ketergantungan terhadap beras begitu tinggi sehingga kebijakan mengimpor beras pun terus dilakukan dan juga kebijakan pangan mie yang berbahan dasar terigu menjadi alternative utama sedangkan terigu merupakan bahan baku yang di impor dikarenakan kurangnya suply beras dalam negeri (Prabowo,2010). Sejahter ini tingkat konsumsi beras yang masih tinggi dan pola konsumsi pangan ke arah terigu memberikan implikasi danakan mengganggu ketahanan pangan daerah.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, ¹an, meratadanterjangkauyang merupakan urusan wajib pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota ¹Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007). Ketahanan pangan terdiri dari tiga subsistem yaitu: (1)Ketersediaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk baik jumlah maupun mutunya serta aman. (2) Distribusi pangan, dimana pasokan pangan dapat menjangkau keseluruhan wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumahtangga dan (3) Konsumsi pangan, yaitu setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi sesuai kaidah gizi dan kesehatan serta preferensinya (Dewan Ketahanan Pangan, 2006).

¹ Kota Jember merupakan salah satu daerah otonom yang memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan keberhasilan ketahanan pangan, salah satunya adalah upaya pencapaian SPM bidang

penganekaragaman dan keamanan pangan. Konsumsi pangan merupakan *output* pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah. Oleh karena itu, penganekaragaman konsumsi pangan merupakan isu penting yang harus ditingkatkan upaya pencapaiannya. Indikator yang digunakan untuk mengetahui kuantitas konsumsi pangan adalah Angka Kecukupan Energi (AKE). Berdasarkan perhitungan terbaru pola pangan harapan standar AKG nasional. Untuk energy adalah 2150 Kkal/kap/hari dan protein menjadi 57 Gr/kap/hari (Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 201¹)

Indikator yang digunakan untuk mengetahui kualitas keragaman konsumsi pangan adalah dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Pola Pangan Harapan dapat digunakan sebagai ukuran keseimbangan gizi dan keanekaragaman pangan yang dikonsumsi oleh penduduk di suatu wilayah. Skor PPH maksimal, yaitu 100 menunjukkan situasi konsumsi pangan yang beragam dan baik komposisi serta mutu gizinya (Baliwati, 2011). Tingkat konsumsi pangan penduduk Kabupaten Jember pada tahun 2015 masih berada di bawah standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan. Hasil telaah nilai PPH oleh Tim NBMPPH Politeknik Negeri Jember di beberapa kecamatan pada beberapa kabupaten dalam wilayah Jawa Timur menunjukkan nilai PPH berkisar antara 50 hingga 90 dengan rata-rata nilai antara 70 hingga 80. Hasil telaah tersebut memunculkan rekomendasi pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian dengan peningkatan produk domestik lokal, karena laju peningkatan produksi pangan masih cenderung melandai dengan pertumbuhan berkisar disatu persen, sedangkan pertumbuhan penduduk melebihi laju peningkatan produksinya. Konsumsi beras masih cukup tinggi dengan kisaran 105–107kg/kap/tahun, diikuti oleh konsumsi terigu yang mengalami kenaikan hingga 8



persen per tahun, namun konsumsi sumber protein, sumber lemak dan vitamin /mineral masih jauh dari harapan. Hasil kondisi nyata kajian dikabupaten tersebut, konsumsi pangan hewani baru mencapai maksimal 6,6 kg/kapita/tahun yang lebih rendah dibanding Malaysia dan Filipina yang masing-masing mencapai 48 kg/kap/tahun dan 18 kg/kapita/tahun.

Faktor – factor yang mempengaruhi konsumsi pangan adalah jenis, jumlah produksi, dan ketersediaan pangan (Harper *et al.* 1986). Kondisi konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kondisi ekonomi, sosial, dan budaya setempat. Faktor lainnya adalah ukuran rumahtangga, tingkat pendidikan, dan pendapatan merupakan factor yang mempengaruhi pola konsumsi rumah tangga (Baliwati, 2007). Pengembangan konsumsi pangan yang dilakukan harus berlandaskan pada SPM bidang pengane-karagaman pangan melalui analisis berdasarkan data susenas dengan pendekatan pola pangan harapan. Sehingga, kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk rekomendasi perencanaan konsumsi pangan penduduk yang berujung pada perwujudan ketahanan pangan di Kabupaten Jember.

FAO-RAPA(1989) mendefinisikan Pola Pangan Harapan adalah “komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energy dan zat gizi lainnya”. Pendekatan Pola Pangan Harapan dapat menilai mutu pangan penduduk berdasarkan skor. Melalui pendekatan Pola Pangan Harapan, keadaan perencanaan penyediaan dan konsumsi pangan penduduk diharapkan dapat memenuhi tidak hanya kecukupan gizi (*nutritional adequacy*), akan tetapi sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutritional balance*) yang didukung oleh citarasa (*palat ability*), daya guna (*digest ability*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kuantitas, dan kemampuan daya beli (*affordability*).

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis situasi konsumsi pangan berdasarkan NBM dan PPH di Kabupaten Jember, mengetahui peran bahan pangan pokok local tradisional dalam diversifikasi konsumsi pangan yang dilakukan oleh Kabupaten Jember dan merumuskan rekomendasi strategi pengembangan konsumsi pangan di Kabupaten Jember

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian *survey* di lingkup daerah Pemerintahan Kabupaten Jember yang terdiri dari 31 kecamatan, dilaksanakan dari awal Juni hingga akhir November 2016. Data primer yang digunakan didapatkan dari kuisioner, wawancara, dan observasi sedangkan data sekunder didapatkan dari Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 1999, 2002 dan 2005 serta BPS Kabupaten Jember dari tahun 2012 hingga 2016. Survey dilakukan pada responden terpilih secara acak sesuai metode statistika di tiap kluster, kecamatan dipilih dengan perpaduan metode *stratified* dan *clustersampling*, lalu pemilihan rumahtangga dengan *non probability, sampling* yaitu *purposive* dengan *judgement sampling*, dengan tahap pertama seluruh kecamatan dikelompokkan berdasarkan tujuh wilayah tingkatan kluster. Kriteria survey dibagi menjadi daerah pedesaan serta daerah perkotaan yang dipilih menurut kelompok pendapatan berdasarkan *WorldBank* (40% rendah, 40% sedang dan 20% tinggi); jenis pekerjaan (pertanian–non pertanian); kedekatan cultural budaya; dan aspek lainnya. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 448 rumah tangga berdasarkan 7 kluster sampel dengan 8 tingkat pengeluaran rumah tangga serta masing- masing 4 daerah perkotaan dan 4 daerah pedesaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif menggunakan tabulasi silang



HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara garis besar kabupaten Jember memiliki kondisi skor PPH yang

cukup baik dan hampir mencapai ideal, baik dari skor PPH, % AKE dan % AKP. Secara rinci dijelaskan pada table dibawah ini.

Tabell Skor Pola Pangan Harapan (PPH)Tingkat Konsumsi Gabungan Wilayah Desa dan

No	Kelompok Pangan	Sifat		Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan(PPH) Gap							
		Kap/Hari	Kalori	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor AKE dan Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	198,5	767	24,6	35,7	0,5	12,3	17,8	25,0	(7,2)	17,8
2	Umbi-umbian	121,3	132	4,2	6,1	0,5	2,1	3,1	2,5	0,6	2,5
3	PanganHewani	207,3	304	9,8	14,1	2,0	19,5	28,3	24,0	4,3	24,0
4	MinyakdanLemak	34,7	305	9,8	14,2	0,5	4,9	7,1	5,0	2,1	5,0
5	Buah/BijiBerminyak	10,3	56	1,8	2,6	0,5	0,9	1,3	1,0	0,3	1,0
6	Kacang-kacangan	42,2	124	4,0	5,8	2,0	7,9	11,5	10,0	1,5	10,0
7	Gula	32,4	116	3,7	5,4	0,5	1,9	2,7	2,5	0,2	2,5
8	SayurdanBuah	571,7	188	6,0	8,7	5,0	30,1	43,7	30,0	13,7	30,0
9	Lain-lain	151,6	100	3,2	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total 2016			2091	67,2	97,3		79,7	115,4	100,0		92,8
Total2015			3114	100,0	144,8		78,0	112,9	100,0		94,2
Total2014			1752	100	87,6		94,8	83	100		80,9

Menurut Isbandi dan Rusdiana (2014), analisis situasi ketersediaan pangan berdasarkan kuantitas terdiri dari jumlah ketersediaan energi dan protein dan kualitas maupun keragaman pangan dapat diketahui melalui skor Pola Pangan Harapan (PPH) dari masing-masing kelompok pangan. Pola Pangan Harapan (PPH) rata-rata Kabupaten Jember tahun 2016 sebesar 92,8, skor ini hampir mendekati skor ideal dengan dengan % AKE yang sudah mencapai SPM. Apabila dilihat dari data pada table 1 kelompok pangan, padi-padian masih belum maksimal di angka 17,8 skor PPH, artinya tingkat konsumsi masyarakat terhadap kelompok pangan ini masih belum mencapai titik maksimal, namun bila diteliti di tiap wilayah pengeluaran baik pedesaan maupun perkotaan masih banyak wilayah yang jumlah konsumsi padi-padiannya melebihi skor PPH maksimal. Sementara itu untuk konsumsi kelompok pangan lainnya seperti pangan heani serta sayur dan buah sudah berada pada titik maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten jember

sudah mampu untuk melaksanakan kemandirian pangan. Sementara itu, pada total nilai % AKE ditahun 2016 sebesar 97,3 menunjukkan bahwa kabupaten jember termasuk dalam kategori tahan pangan. Skor ini merupakan Skor yang lebih baik dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Timur. Menurut BKP Mojokerto (2015), skor PPH yang dicapai kabupaten Mojokerto sebesar 79,89 di tahun 2015. Perolehan skor PPH ini menunjukkan bahwa keragaman konsumsi pangan di Mojokerto masih belum cukup baik mutu maupun gizinya. Meskipun dari tahun sebelumnya skor PPH kabupaten jember menurun sebesar 1,4. Secara garis besar skor PPH kabupaten jember ini masih berada dibawah skor ideal yang diharapkan, Lebih detail dapat dijabarkan pada table kategori nilai PPH, % AKE dan % AKP untuk setiap golongan tingkat konsumsi wilayah pedesaan dan perkotaan dibawah ini



Tabel 2 Kategori Nilai PPH, % AKE dan % AKP untuk Setiap Golongan Tingkat Konsumsi Wilayah Desa dan Kota

GOLONGAN	PPH	KATEGORI	%AKE	KATEGORI	%AKP	KATEGORI
I	74,3	dibawahSPM	60,8	sangatrawanpangan	84,8	Sedang
II	84,0	dibawahSPM	79,8	rawanpangan	100,1	Baik
III	69,4	dibawahSPM	74,4	rawanpangan	106,4	Baik
IV	85,6	dibawahSPM	76,6	rawanpangan	106,8	Baik
V	100,0	di atasSPM	134,1	melebihiAKE	170,4	Baik
VI	83,7	dibawahSPM	99,3	tahanpangan	162,1	Baik
VII	94,2	di atasSPM	156,0	melebihiAKE	162,6	Baik
VIII	100,0	di atasSPM	161,3	melebihiAKE	187,2	Baik
Rata-rata2016	93,1	di atasSPM	98,0	tahanpangan	125,9	Baik
Rata-rata2015	87,8	dibawahSPM	144,8	melebihiAKE	147,5	Baik
Rata-rata2014	80,9	dibawahSPM	87,6	rawanpangan	98,0	Sedang

Tabel kategori penggabungan dari wilayah pedesaan dan perkotaan menunjukkan nilai PPH, % AKE dan % AKP yang lebih baik. Hal ini menjelaskan bahwa rata-rata kurangnya persediaan pangan di daerah perkotaan dapat di atasi dengan persediaan pangan yang berlebih di daerah pedesaan. Salah satu contoh nyata adalah yang terdapat pada golongan III perkotaan dimana pada % AKP nya termasuk dalam kategori defisit tetapi pada saat bersamaan % AKP di pedesaan golongan III tergolong baik bahkan melebihi 100% AKP. Tabel 2 menggambarkan bahwa terdapat % lima golongan secara acak yang tergolong dalam kategori dibawah SPM yakni golongan I, II, III, IV dan VI. Sedangkan golongan V, VII dan VIII memiliki kategori diatas SPM. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan tidak selamanya mempengaruhi besarnya tingkat konsumsi dan pola konsumsi masyarakat. Menurut Prasetyo, Teguh Jati, dkk. (2013), pola konsumsi masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat pengetahuan terhadap pangan yang dikonsumsi dan pendapatan masyarakat Dalam memenuhi kebutuhan pangan. pencapaian skor PPH juga dipengaruhi oleh factor lain seperti kondisi iklim yang selalu berubah, geografis, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan gaya

hidup dari masyarakat itu sendiri. Sementara menurut Hardinsyah *etal* (2001), pola konsumsi dipengaruhi oleh jumlah mutu, keragaman, kandungan gizi dan keamanannya serta terjangkau oleh daya beli masyarakat. Sedangkan menurut Prasctyarini et al (2014) yang menyatakan pencapaian skor PPH juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan pola konsumsi dari masyarakat tersebut di antaranya kondisi iklim yang selalu berubah tidak menentu, kondisi geografis, kondisi sosial, kondisi ekonomi, budaya, pendidikan dan gaya hidup dari masyarakatnya sendiri

Beberapa factor yang mempengaruhi pola konsumsi dengan meliha terata golongan Pengeluaran rata- rata di wilayah pedesaan dan perkotaan antara lain: (1) Semakin besar tingkat pendapatan rumah tangga, biasanya akan diikuti dengan tingkat konsumsi (pengeluaran) yang tinggi, sebaliknya tingkat pendapatan yang rendah akan diikuti dengan tingkat konsumsi yang rendah pula. Disisi lain, semakin kecil pendapatan rumah tangga maka prosentase pengeluaran untuk pangan akan semakin tinggi, dan sebaliknya. Pendapatan yang rendah akan memberikan konsekuensi



alokasi pengeluaran yang tinggi untuk pangan, disisi lain masyarakat berpenghasilan tinggi akan membelanjakan untuk konsumsi pangan dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan *value addednya*. Survey ini tidak mengikut sertakan penghasilan yang diperoleh keluarga, karena hasil-hasil survey sebelumnya memberikan laporan adanya kecenderungan keluarga untuk memperbesar jumlah penghasilan yang didapat dan membelanjakan lebih banyak untuk keperluan non pangan. (2) Penyumbang skor PPH Tingkat Konsumsi untuk kelompok pangan umbi-umbian telah mencapai titik maksimal. Hal ini berarti penganekaragaman makanan yang mengandalkan basis umbi-umbian tidak mempengaruhi kenaikan skor PPH sebagaimana kebijakan sebelumnya. Kebijakan pemerintah Kabupaten Jember adalah meningkatkan pola asupan padi-padian serta mempertahankan konsumsi umbi-umbian seperti kondisi sekarang. Kelompok pangan meliputi pangan hewani, minyak lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula dan sayur buah telah mencapai angka maksimal. Selain PPH, konsep gizi seimbang sebenarnya telah diawali dalam slogan "4 sehat 5 sempurna" mapun slogan "Panganku Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman.

(3B)serta slogan SAH-B; "Sehat, Aman Halal dan Berimbang" (Yohannes, 2014). Perlu upaya untuk tetap mempertahankan pola konsumsi demikian, mengingat pola makan mudah mengalami pergeseran. Kebijakan lainnya secara umum adalah upaya meningkatkan ketersediaan sayur dan buah serta pangan hewani, mengingat jumlah konsumsi secara actual telah melebihi ketersediaan komoditi tersebut. Ketersediaan total skor PPH

kabupaten jember adalah 94,49. Nilai ini menjukan bahwa kabupaten jember sudah tergolong dalam kategori tahan pangan dan mampu untuk mewujudkan kemandirian pangan. Bila dilihat dari kontribusi energi dengan perbandingan standar nasional terdapat 4 jenis bahan pangan utama dengan kontribusi yang maksimal yakni terdapat pada padi-padian, pangan hewani, minyak dan lemak serta gula. Dibandingkan dengan kabupaten Mojokerto dalam penelitian (2015) dengan skor PPH ketersediaan sebesar 79,89, kabupaten jember memiliki tingkat persediaan yang lebih baik. Meskipun begitu, skor PPH secara keseluruhan belum menunjukkan hasil yang maksimal karena beberapa komoditi memiliki tingkat ketersediaan yang kurang maksimal, maka dari itu dibutuhkan peningkatan pada kelompok pangan umbi-umbian, buah/biji berminyak serta sayuran dan buah. Kondisi ini didukung oleh Riadi (2007), penurunan rata-rata produksi yang terjadi disuatu wilayah dapat disebabkan oleh berkurangnya lahan- lahan produktif dan bertambahnya jumlah penduduk di wilayah tersebut. Tingkat ketersediaan di tahun 2016 cenderung lebih rendah dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya di Kabupaten Jember. Hal ini sejalan dengan penelitian Handini (2006) yang menyatakan bahwa pencapaian produksi untuk memenuhi kebutuhan diperlukan luas lahan yang dapat memproduksi pangan untuk mencapai ideal, namun terjadinya konversi lahan yang terus menerus menyebabkan kurang mendukungnya luas lahan untuk memproduksi pangan hingga mencapai ketersediaan pangan yang ideal. Namun Dinas Perkebunan Kabupaten Jember (2015), menyatakan penurunan daya dukung luas lahan pertanian dapat diantisipasi dengan beberapa alternatif seperti pertanian berkelanjutan dan penggunaan lahan yang tepat



Rekomendasi Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Jember

Menurut Hariyadi (2011), ketahanan pangan didasarkan pada tiga indikator ketahanan pangan yakni ketersediaan energy perkapita, keterjangkauan pangan serta kecukupan konsumsi pangan. Sementara, menurut Anas, dkk (2008) yang menyatakan bahwa tingkat ketersediaan pangan belum tentu dapat menjamin keberagaman pangan yang tersedia dan tidak dapat menjamin konsumsi pangan penduduk beragam, bergizi dan seimbang yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan dan gizi. Ketahanan pangan akan tercapai apabila kelompok pangan yang dikonsumsi masyarakat seimbang antara ketersediaan dan tingkat konsumsi. Keberhasilan terciptanya ketahanan pangan di Jember akan mendukung kelompok rumah tangga untuk dapat melaksanakan kemandirian pangan serta swasembada pangan. Swasembada pangan merupakan kondisi pangan yang sudah mampu memenuhi kebutuhan tanpa harus melakukan impor untuk mencukupinya. Hasil analisa PPH konsumsi Kabupaten Jember sebesar 92,8 di dominasi oleh kelompok pangan padi-padian dan juga umbi-umbian. Penyumbang skor PPH untuk kelompok pangan padi-padian dan umbi-umbian telah mencapai titik maksimal. Hal ini berarti panganekaragaman makanan yang mengandalkan atau berbasis umbi-umbian tidak mempengaruhi kenaikan skor PPH. Kebijakan pemerintah Kabupaten Jember adalah meningkatkan pola asupan padi-padian serta mempertahankan konsumsi umbi-umbian seperti kondisi sekarang. Potensi ketersediaan pangan berdasarkan NBM di Kabupaten Jember terutama bersumber dari padi-padian dan umbi-umbian, pangan hewani dan gula sudah melebihi kebutuhan penduduk. Penyadaran

masyarakat akan pangan dan gizi serta kesehatan perlu ditingkatkan, sehingga jumlah dan jenis pangan yang dikonsumsi sesuai dengan kebutuhannya. *Political will* dan *political power* dari pemerintah menjadi ujung tombak keberhasilan hal tersebut. Mengingat terdapat beberapa golongan yang berada dalam kategori deficit dan rawan pangan perlu adanya peningkatan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga dengan mengembangkan komoditas pangan local sesuai potensi sumber daya dan pola konsumsi masyarakat setempat. Menurut Ariani(2010), terwujudnya ketahanan pangan nasional harus dimulai dengan penguatan ketahanan pangan daerah, baik dari segi ketersediaan maupun segi konsumsi. Pemerintah dalam hal ini tidak dapat berperan sebagai *single fighter* namun peran serta masyarakat sangat dibutuhkan demi terwujudnya ketahanan pangan yang ingin dicapai. Pemerintah diharapkan dapat berperan sebagai fasilitator kepada masyarakat yang berperan sesuai dengan kapasitas dan potensi yang dimiliki oleh setiap golongan rumah tangga. Hasil survey menunjukkan cara agar Kabupaten Jember menjadi wilayah yang mampu melakukan ketahanan pangan maka dapat direkomendasikan untuk ditindaklanjuti hal-hal berikut ini.

Peningkatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan Beragam, bergizi, seimbang dan aman, terutama untuk komoditi sayur dan buah terkait dengan nilai PPH Ketersediaan komoditi sayur dan Buah yang masih dibawah kebutuhan PPH Tingkat Konsumsi secara aktual. Guna meningkatkan skor PPH ditahun mendatang kabupaten jember, perlu upaya peningkatan ketersediaan terhadap kelompok pangan yang memiliki skor PPH rendah seperti umbi-umbian, buah/biji berminyak dan sayur dan buah. Terkait dengan pengelolaan ketersediaan pangan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan hasil



kajian pengeluaran pangan yang ternyata linier dengan ketahanan pangan, perlu adanya perumusan data peta kerawanan pangan. Hal ini disebabkan hasil kajian analisis berdasarkan Golongan Pengeluaran, belum mampu memetakan desa atau yang dikategorikan rawan pangan, melainkan hanya wilayah pedesaan atau perkotaan secara umum (klaster).

Tim NBMPPH Politeknik Negeri Jember telah menelaah bahwa faktor penyebab belum berkembangannya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan dengan gizi seimbang yang berbasis pada pangan local di beberapa kabupaten khususnya Kabupaten Jember tersebut secara umum, adalah: (1) belum berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian local dan pengembangan aneka pangan local lainnya, (2) belum berkembangnya bisnis pangan melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat-swasta, (3) belum optimalnya usaha perubahan perilaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal, (4) rendahnya citra pangan lokal, (5) belum optimalnya pengembangan program perbaikan gizi yang *costeffective*, diantaranya melalui peningkatan dan penguatan program fortifikasi pangan dan program suplementasi zat gizi mikro. Oleh karena itu perlu dirumuskan kebijakan yang dapat menguntungkan masyarakat dalam mendukung tercapainya PPH yang ideal.

Pemerintah berperan penting dalam rangka mempengaruhi keputusan dalam pemilihan pola konsumsi masyarakat. Secara umum, kebijakan pemerintah dapat dibagi kedalam beberapa rentang waktu karena terkait dengan tujuan dan implikasinya terhadap ekonomi masyarakat. Adapun kebijakan pemerintah dalam jangka pendek dapat berupa satuan kredit usaha tani A

dibidang agribisnis sehingga menstimulasi perkembangan kegiatan ekonomi usaha tani agar semakin meningkat. Serta sosialisasi kepada masyarakat khususnya kegiatan pendidikan kesejahteraan keluarga mengenai pentingnya pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Pemberian modal dan pembinaan jangka pendek kepada UKM pangankecil menengah menekankan pada kegiatan promosi pola pangan seimbang yang berimplikasi terhadap pola pangan masyarakat sekitarnya. Seperti mengganti komposisi beras dengan umbi-umbian. Kebijakan pemerintah dalam jangka menengah dan panjang dengan peningkatan akses petani terhadap permodalan dan sarana produksi pertanian. Salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah dengan memberikan asuransi gagal panen untuk petani sayur dan buah yang kemungkinan diakibatkan oleh musim atau hama serta akibat *forcemajor* lainnya, selain kemudahan akses pemasaran untuk komoditi sayur dan buah local tertentu agar dapat bersaing dengan sayur dan buah import. Kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh pangan melalui penanganan stabilitas harga pangan. Disisi lain diperlukan gerakan OVOP (*one village one product*) agar tidak terjadi lonjakan produksi serta penurunan harga komoditi sayur atau buah akibat *over supply*. Disamping itu perlu diberikan pelatihan untuk penanganan produk sayur dan buah local agar mampu mendapatkan sertifikasikeamanan dan mutu produk (*Good Agriculture Practice*) dengan pengakuan Prima-1 hingga Prima-3. untuk peningkatan nilai tambah ekonomi

KESIMPULAN

Hasil kajiandantemuan penelitian mengenai analisis ketahanan pangan di Kabupaten Jember yang telah dibahas dapat diambil beberapa kesimpulan Sebagai berikut:(1) Skor PPH konsumsi Kabupaten Jember sebesar 92,8 di dominasi oleh kelompok pangan padi- padian dan juga umbi-umbian. (2)Bahan pangan local seperti



ubi- ubian dikonsumsi oleh rumah tangga sebagai pengganti makanan pokok apabila tidak mampu membeli beras. . Penyumbang skor PPH untuk kelompok pangan padi- padian dan umbi-umbian telah mencapai titik maksimal. Hal ini berarti penganeekaragaman makanan yang mengandalkan atau berbasis umbi-umbian tidak mempengaruhi kenaikan skor PPH. Kebijakan pemerintah Kabupaten Jember adalah meningkatkan pola asupan padi- padian serta mempertahankan konsumsi umbi-umbian seperti kondisi sekarang. Sementara kelompok pangan berpati umumnya diolah menjadi makanan pelengkap.(3) Strategi yang perlu dilakukan untuk menciptakan ketahanan pangan di wilayah jember dengan peran pemerintah sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pemeran utama sesuai dengan kapasitas dan potensi masing- masing golongan.

SARAN

Hasil kajiandan temuanyang telah dibahas dan dijabarkan mengungkapkan beberapa hal yang perlu disarankan antaralain :(1) Perlunya ketersediaan data

yang lengkap pada tingkat Kabupaten secara periodik untuk memudahkan analisis dan penentuan strategi pengembangan pola konsumsi pangan yang akan diambil. (2) Pengelolaan data yang digunakan masih terbatas pada perhitungan berdasarkan individu atau kelompok yang mengonsumsi, sebaiknya diambahkan atau dimodifikasi untuk perhitungan berdasarkan komoditas sehingga dapat langsung digunakan untuk perhitungan proyeksi konsumsi pangan.(3) Penelitian ini menggunakan data konsumsi pangan dan baru mencapai pada tahap analisis konsumsi pangan, sehingga ada baiknya dilakukan pengembangan penelitian lebih lanjut dengan penambahan sumber data lain sehingga dapat ditentukan proyeksi dan pengembangan terhadap konsumsi pangan sampai pada tahap ketersediaan penyesuaian terhadap potensi agro ekosistem wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas,dkk..*Analisis DinamikaKetahanan Pangan Di Kabupaten Jember*. JSEP (Journal of Social andAgricultural Economics),[S.l.],v.2,n.2,p.51-60, July 2008.
- Ariani.2010.*Analisis Konsumsi Pangan Tingkat MasyarakatMendukung PencapaianDiversifikasi Pangan. GiziIndonesia*, 33(1):20-28.
- Baliwati. 2004. *PengantarPangandan Gizi*, CetakanI.Jakarta: Penerbit Swadaya
- Baliwati. 2011.*Faktor-FaktorYang Berpengaruh Terhadap Konsumsi Pangan Sumber Karbohidrat Di Perdesaan Dan Perkotaan*. Jurnal Gizidan Pangan, 6(3):200-207.
- Biro Pusat Statistik. 2016. *Statistik Indonesia*. Biro Pusat Statistik, Jakarta.
- Biro Pusat Statistik. 2016. *Laporan Tahun 2016*. Biro Pusat Statistik, Kab. Jember.
- Badan Ketahanan Pangan Mojokerto. 2015. *Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Kab.Mojokerto*.Mojokerto
- Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. 2016.*PetaKetahanan Dan Kerawanan Pangan ProvinsiJawa Timur*.Surabaya



- Dewan Ketahanan Pangan. 2006. *Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Indonesia 2015: Versi Rangkuman*. Dewan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian Dan World Food Programme (WFP):Jakarta.
- Dinas Perkebunan Kabupaten Jember.2015. Laporan Tahun 201
- FAO-RAPA,1989. *Report of The Regional Expert Consultation of The Asian Network for Food and Nutrition and Urbanization*. Bangkok.
- Food and Agriculture Organization (FAO). 2003. *Trade Reform and Food Security:Conceptualizing the Linkages*. FAO:Rome.
- Handini.2006.*Analisis DanPerencanaan Ketersediaan Pangan Berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH)Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Hardinyah,etal. 2001. *Menaksir Kecukupan Energi dan Protein Serta Penilaian Mutu Gizi Konsumsi Pangan*. Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga, Intitut Pertanian Bogor, Wirasari, Jakarta.
- Hariyadi,R.2011. *Memproduksi Pangan Yang Aman*. Jakarta :Dian Rakyat
- Harperet al. 1986.*Pangan, Gizi dan Pertanian*.Suhardjo, Penerjemah. Jakarta:Ulpres
- Isbandi dan Rusdiana. 2014. Strategi tercapainya ketahanan pangan dalam ketersediaan pangan di tingkat regional. *Agriekonomika*.3(2):117-132
- Prabowo, Rossi. 2010. *Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Indonesia*. Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian mediagro,6(2):62 – 73
- Prasetyo,Teguh Jati,dkk. 2013. *Konsumsi Pangan Dan Gizi Serta SkorPola Pangan Harapan (PPH)PadaAnak Usia2—6 Tahun Di Indonesia*. Jurnal Gizi dan Pangan, 8(3):159-166.
- Prasetyarini etal. 2014. Analisis Penyediaan Pangan Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Sidoarjo. *AGRISE*
- Peraturan Pemerintah No.38 tahun 2007. Jakarta.
- Riadi.2007.*Analisis Situasi Penyediaan Pangan dan strategi untuk memantapkan ketahanan pangan Kabupaten Kotabaru di era Otonom daerah*. Institut Pertanian Bogor. Bogor

ANALISIS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JEMBER

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ex08014.blogspot.com

Internet Source

5%

2

www.jurnal.una.ac.id

Internet Source

5%

Exclude quotes On

Exclude matches < 3%

Exclude bibliography On